

Rekrutmen Calon Legislatif Muda Partai Golongan Karya Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024

Recruitment of Young Worker Legislative Candidates for the House of Representatives of the Republic of Indonesia for the 2019-2024 Period

Delya Afrida Sari, Wawan Budi Darmawan & Firman Manan*

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Submitted: November 2020; Reviewed: November 2020; Accepted: January 2021;

**Corresponding Email:*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan rekrutmen calon legislatif muda Partai Golkar pada pemilu 2019. Masalah difokuskan pada bagaimana rekrutmen calon legislatif muda yang dilakukan partai Golkar. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori teori perekrutan politik dari Michael Rush dan Philip Althoff. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yang bermaksud memberikan hasil eksplorasi atau penjelajahan informasi atas tujuan penelitian. Kajian ini menyimpulkan bahwa perekrutan politik calon legislatif muda partai Golkar untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 meliputi lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan.

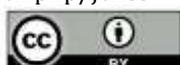
Kata Kunci: Rekrutmen Politik; Legislatif Muda; Partai Politik

Abstract

This paper aims to describe the recruitment of young legislative candidates for the Golkar Party in the 2019 elections. The problem is focused on how the recruitment of young legislative candidates is carried out by the Golkar party. In order to approach this problem, the theory of political recruitment from Michael Rush and Philip Althoff was used. The data were collected through interviews and analyzed qualitatively. The type of research used is descriptive which intends to provide the results of exploration or exploration of information on the research objectives. This study concludes that the political recruitment of young Golkar party legislative candidates for the House of Representatives of the Republic of Indonesia for the 2019-2024 period includes five activity processes, namely: supply and demand, agency, criteria, control and demand.

Keywords: Political Recruitment; Young Legislatives; Political Parties,

How to Cite: Sari, D.A., Darmawan, W.B., & Manan, F. (2021), Rekrutmen Calon Legislatif Muda Partai Golongan Karya Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3): 987-995



PENDAHULUAN

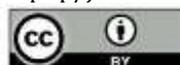
Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang di dalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayai (Budiardjo, 2008). Mengikuti logika demokrasi, para pejabat politik (legislatif dan eksekutif) yang telah memperoleh mandat melalui partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, harus mengelola sumberdaya ekonomi-politik (kekuasaan dan kekayaan) bersandar pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsivitas untuk masyarakat. Dalam sistem pemilihan umum masyarakat memilih para wakil rakyat, baik DPR atau DPRD.

Di sisi lain, partai politik dan pemilihan umum merupakan tempat yang paling tepat untuk proses rekrutmen politik, dalam rangka mengorganisir kekuasaan secara demokratis. Selama ini ada argumen yang menyatakan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akansangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika kapasitas dan legitimasi DPR RI lemah, salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Undang-undang pemilihan umum sekarang telah menerapkan sistem proporsional terbuka, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses rekrutmen parlemen. Akan tetapi undang-undang tersebut akan menjadi barang mati jika tidak ada aksi konkret yang lebih maju dalam proses rekrutmen.

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya (Firmanzah, 2008)

Partai Golongan Karya memiliki sejarah penting dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Para era Orde Baru Partai Golkar menjadi partai pemenang pada setiap pemilu dan menjadi partai yang menguasai pemerintahan dan politik pada masa itu. Partai Golkar memiliki beberapa basis massa sosial politik untuk keberlangsungan kemenangan pada pemilu. Jika melihat pada sejarah berdirinya Partai Golkar terdapat 3 organisasi yang mendirikan golongan karya yaitu organisasi KOSGORO yang memiliki bidang Ekonomi, organisasi SOKSO yang memiliki bidang pekerja atau buruh, dan organisasi MKGR yang fokus bidangnya pada pendidikan (Nurjaman, 2018). Melalui ketiga organisasi tersebut, bergabung mendirikan Golongan Karya dan mengikuti pemilu pertamanya pada tahun 1971. Dari tahun ke tahun pemilu Orde Baru, suara Golongan Karya terus meningkat. Golongan Karya menjadi partai pemenang pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 (Prayogo, 2015). Kekuatan Golongan Karya juga didukung oleh PNS dan ABRI, karena pada masa Orde Baru masih terdapat dwifungsi ABRI yang memperbolehkan TNI dan Polri ikut berperan aktif pada politik. Pada masa itu Golongan Karya menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan maupun politik (Haris, 2014).

Namun, suara Partai Golkar terus menurun hingga pada masa reformasi. Basis-basis sosial Partai Golkar juga semakin berkurang karena yang dulunya TNI dan Polri menjadi lumbung suara partai Golkar kini tidak bisa lagi ikut berperan aktif pada politik praktis. Bahkan Partai Golkar juga sering tersangkut kasus-kasus yang dapat mencoreng citra Partai Golkar seperti yang dilakukan



mantan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setya Nivanto pada kasus Korupsi KTP elektronik serta berbagai macam kasus korupsi yang menjerat politisi Partai Golkar. Dengan adanya hal tersebut Partai Golkar harus mencari kader-kader yang memiliki integritas tinggi agar kelak jika dirinya terpilih tidak menjatuhkan citra baik Partai Golkar.

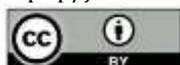
Partai Golkar memiliki organisasi-organisasi kepemudaan seperti AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) dan AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) untuk menjadi regenerasi kader Partai Golkar dari kalangan pemuda-pemuda yang telah mendapatkan pelatihan kader dari organisasi-organisasi Kepemudaan Partai Golkar. Hal tersebut dilakukan sebagai fungsi regenerasi yang bertujuan untuk keberlangsungan partai dapat terus berjalan, dengan begitu partai politik memiliki tugas penting yaitu melakukan kaderisasi. Kaderisasi adalah tulang punggung partai politik, tegak bungkunya partai politik tergantung pada kekuatan kaderisasi partai politik (Mukmin, 2015).

Partai Golongan Karya memiliki sejarah penting dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Para era Orde Baru Partai Golkar menjadi partai pemenang pada setiap pemilu dan menjadi partai yang menguasai pemerintahan dan politik pada masa itu. Partai Golkar memiliki beberapa basis massa sosial politik untuk keberlangsungan kemenangan pada pemilu. Jika melihat pada sejarah berdirinya Partai Golkar terdapat 3 organisasi yang mendirikan golongan karya yaitu organisasi KOSGORO yang memiliki bidang Ekonomi, organisasi SOKSO yang memiliki bidang pekerja atau buruh, dan organisasi MKGR yang fokus bidangnya pada pendidikan (Nurjaman, 2018). Melalui ketiga organisasi tersebut, bergabung mendirikan Golongan Karya dan mengikuti pemilu pertamanya pada tahun 1971. Dari tahun ke tahun pemilu Orde Baru, suara Golongan Karya terus meningkat. Golongan Karya menjadi partai pemenang pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 (Prayogo, 2015). Kekuatan Golongan Karya juga didukung oleh PNS dan ABRI, karena pada masa Orde Baru masih terdapat dwifungsi ABRI yang memperbolehkan TNI dan Polri ikut berperan aktif pada politik. Pada masa itu Golongan Karya menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan maupun politik (Haris, 2014).

Namun, suara Partai Golkar terus menurun hingga pada masa reformasi. Basis-basis sosial Partai Golkar juga semakin berkurang karena yang dulunya TNI dan Polri menjadi lumbung suara partai Golkar kini tidak bisa lagi ikut berperan aktif pada politik praktis. Bahkan Partai Golkar juga sering tersangkut kasus-kasus yang dapat mencoreng citra Partai Golkar seperti yang dilakukan mantan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setya Nivanto pada kasus Korupsi KTP elektronik serta berbagai macam kasus korupsi yang menjerat politisi Partai Golkar. Dengan adanya hal tersebut Partai Golkar harus mencari kader-kader yang memiliki integritas tinggi agar kelak jika dirinya terpilih tidak menjatuhkan citra baik Partai Golkar.

Partai Golkar memiliki organisasi-organisasi kepemudaan seperti AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) dan AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) untuk menjadi regenerasi kader Partai Golkar dari kalangan pemuda-pemuda yang telah mendapatkan pelatihan kader dari organisasi-organisasi Kepemudaan Partai Golkar. Hal tersebut dilakukan sebagai fungsi regenerasi yang bertujuan untuk keberlangsungan partai dapat terus berjalan, dengan begitu partai politik memiliki tugas penting yaitu melakukan kaderisasi. Kaderisasi adalah tulang punggung partai politik, tegak bungkunya partai politik tergantung pada kekuatan kaderisasi partai politik (Mukmin, 2015).

Dalam pemilu legislatif 2019, Partai Golkar mencalonkan kader-kader mudanya untuk ikut berkontestasi pada pemilu legislatif. Dengan adanya kader muda yang dicalonkan Partai Golkar, juga akan menambah suara pemilih dari generasi-generasi muda Indonesia yang tentunya menjadi lumbung suara baru bagi Partai Golongan Karya. Dengan hadirnya kader muda pada politik praktis dapat membawa nafas baru bagi senayan maupun DPRD kota atau Provinsi. Jika



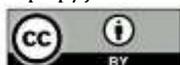
melihat pada sejarah bangsa Indonesia, generasi muda merupakan tonggak perjuangan bangsa dan menjadi pelopor pada setiap keresahan yang dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Selain itu di zaman yang serba digital, banyak generasi muda dinilai mampu untuk membawa perubahan dalam parlemen dan lebih kompeten dalam membuat regulasi di zaman yang serba digital ini. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019, jumlah pemuda sebesar 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan distribusi menurut wilayah, lebih dari separuh pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa (52,28 persen) (Amannullah, 2019). Hal tersebut menjadi pertimbangan partai politik untuk mengusung calon legislatif dari generasi muda untuk meningkatkan suara Partai.

Generasi muda adalah salah satu domain yang paling menarik diperbincangkan, apalagi ketika dikaitkan dengan politik praktis seperti pemilihan umum. Tentu hal tersebut menjadi alasan besar bagi peneliti yang akan mengungkapkan perekrutan calon legislatif muda partai Golkar. Menariknya lagi, peneliti ingin mengungkapkan alasan partai Golkar dalam mendorong kader mudanya dalam kontestasi politik nasional. Partai Golkar dinilai pro caleg muda. Berdasarkan data internal DPP Golkar, ada 47 caleg muda dari 573 caleg DPR se-Indonesia di Pemilu Legislatif 2019. Partai Golkar memberikan tempat dan ruang bagi caleg muda. Menurut Bapak Romli Kesekjenan DPP Partai Golkar pemilu 2014 Partai Golkar tidak memunculkan caleg muda, pemilu 2014 partai Golkar fokus pada pemenuhan kuota 30% perempuan. Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartanto Golkar telah mengikuti tren masa depan dengan mengikut sertakan caleg muda dengan jumlah besar.

Dengan demikian, basis kekuatan akan semakin meluas merambah pemilih pemula. Ini adalah salah satu cara Partai Golkar untuk mengambil suara pemilih pemula dan memperluas basis Partai Golkar. Saat ini Golkar telah menggabungkan generasi muda dan senior, yakni menggabungkan kekuatan senior berpengalaman dan pemuda penuh semangat serta penuh harapan. Caleg muda di Golkar telah memiliki pengalaman, jaringan, dan finansial. Sehingga membuat potensi menang caleg muda Golkar cukup besar dibandingkan dengan caleg muda partai lain. Partai Golkar yang sebelumnya dikenal sebagai "Partai Orang Tua" namun pada pemilu 2019 Partai Golkar justru banyak mencalonkan caleg muda. Minimnya penelitian tentang Golkar berkaitan dengan caleg muda juga menjadi salah satu alasan peneliti. Namun setidaknya penulis akan memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Sejauh ini tentang rekrutmen politik yang telah dilakukan, beberapa diantaranya fokus pada tiga aspek. *Pertama*, faktor internal partai politik, dimana elite partai memainkan peran penting dalam rekrutmen seperti pada penelitian, (Salsabila, 2016) pada penelitiannya dijelaskan bahwa pemimpin partai memegang peran kunci dalam rekrutmen politik. *Kedua*, faktor eksternal partai politik, seperti pada penelitian (Rahmadania, 2016),(Permatasari, 2017), fokus penelitiannya menggambarkan pada pola rekrutmen berdasarkan uang, kedekatan elite, dan ikatan keluarga. *Ketiga*, faktor kualitas kandidat, seperti pada penelitian (Sugeng, 2015) di mana melihat rekrutmen sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh calon Legislatif.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas rekrutmen partai politik serta permasalahannya tersebut menjadi rujukan yang digunakan oleh peneliti. Masih ada beberapa persoalan yang belum terungkap dalam melihat persoalan yang terkait dengan rekrutmen calon legislatif muda. Studi-studi di atas berfokus pada rekrutmen partai politik, baik dalam aspek internal partai, aspek internal calon legislatif, aspek kualitas calon legislatif atau aspek eksternal, sementara belum ada penelitian yang menilai dari aspek alasan suatu partai politik merekrut calon legislatif muda pada pemilu dan proses perekrutan politik yang meliputi : penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap



layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. kriteria ini, tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif (Rush, Michael & Althoff, dalam Komarudin, 2011). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang rekrutmen calon legislatif muda Partai Golkar untuk DPR RI periode 2019-2024.

METODE PENELITIAN

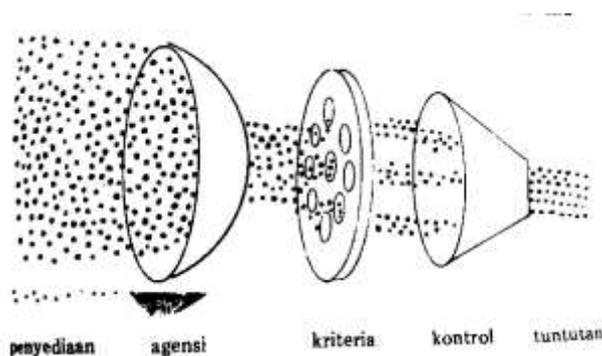
Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu masalah yang ada, dengan mencatat, menentukan, mengklarifikasi serta menganalisa data yang diperoleh sehingga dalam pengambilan kesimpulan dapat sesuai dengan pokok permasalahan. Penelitian ini akan lebih menekankan pada gambaran dan penjelasan detail mengenai strategi rekrutmen partai politik sehingga dipilih metode kualitatif, bukan kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena penulis hendak menggambarkan bagaimana strategi rekrutmen partai golongan karya secara mendalam. Maka dari itu harus dilakukan penelitian dengan teknik-teknik pengumpulan datanya. Metode ini dipilih juga karena penulis akan mencari data primer dengan mewawancarai informan agar mendapat data dan informasi yang lebih mendalam tersebut.

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang dapat ditentukan, dibuktikan, dan dikembangkan untuk suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Penelitian kualitatif (Moleong, 2010) adalah penelitian yang memiliki maksud untuk memahami sebuah fenomena mengenai apa yang dialami oleh objek dalam suatu penelitian, misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi yang diungkapkan dengan kata-kata dan dalam bahasa dengan tetap memanfaatkan berbagai metode. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk studi kasus karena akan melakukan analisis yang mendalam tentang suatu peristiwa atau situasi pada fenomena kontemporer. Penelitian studi kasus lebih menekankan pada pertanyaan bagaimana dan mengapa yang berfokus pada peristiwa kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori perekrutan politik dari Michael Rush dan Philip Althoff. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff perekrutan politik meliputi lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. kriteria ini, tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif (Rush, Michael & Althoff, dalam Komarudin, 2011).

Gambar 1 Model Perekrutan Politik



Sumber : (Rush, Michael & Althoff, dalam Komarudin, 2011)

Berdasarkan gambar 1 menjelaskan perekrutan politik meliputi lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Berikut adalah penjelasan mengenai lima proses perekrutan politik Rekrutmen Calon Legislatif Muda Partai Golongan Karya Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024:

Penyediaan dan permintaan

Penyediaan dalam hal ini merupakan suatu proses rekrutmen agar suatu partai dapat memenuhi kebutuhan partai dalam hal calon legislatif untuk pemilu. Penyediaan untuk memenuhi permintaan merupakan keharusan dalam menjalankan suatu program partai, karena untuk menjalankan program serta merealisasikannya, maka dibutuhkan format strategi khusus yang matang agar apa yang menjadi target dan tujuan program tersebut dapat benar-benar tercapai.

Pencalonan anggota badan-badan legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum (pemilu). Bagi partai golkar keterlibatan pemuda di 2019 sangat-sangat kuat kontribusinya, konsolidasi dari 2009, dan 2015 golkar mengalami penurunan suara, mulai 2016 peranan pemuda sangat dikedepankan terutama sayap partai golkar AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) dan sayap perempuan KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) (Agus, wawancara, 2020).

Dalam sistem pemilihan terbuka, perolehan suara terbanyak itu dari orang muda atau senior. Namun sekarang terbukti para pemuda yang lebih banyak memiliki suara (Agus, wawancara, 2020). Hal ini menuntut permintaan terhadap calon legislatif muda partai golkar. Pemuda satu satunya cara sebagai sumberdaya di partai yang berkelanjutan, mereka memiliki proses yang sangat terbuka bisa bersaing untuk saling menunjukkan prestasi, itu keunggulan di golkar yang telah dijalankan selama ini.

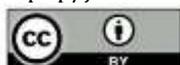
Agensi

Partai-partai politik jelas merupakan sarana yang paling penting dalam kebanyakan sistem politik untuk merekrut sebagian besar pemegang jabatan politik. Pentingnya partai-partai sebagai agensi perekrutan dilukiskan sejauh mana partai-partai tertentu merupakan wahana perekrutan para pemegang jabatan. Untuk badan agensi perekrutan akan ditetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri - ciri dan ketrampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon legislatif. Untuk partai golkar sendiri tidak ada jalur khusus dalam hal pendaftaran calon legislatif, karena sistem terbuka jadi semua memiliki kesempatan yang sama (Agus, wawancara, 2020).

Kriteria

Kriteria yang digunakan oleh partai berbeda-beda, bahkan dapat berbeda banyak sekali. Kriteria ini disesuaikan dengan pemilih yang dituju. Tiap calon yang dipilih oleh partai disesuaikan dengan dapil masing-masing, misal mengenai daerah pemilih yang lebih pedesaan atau perkotaan (Rush, Michael & Althoff, 2002). Sebelum pemilu 2019 partai golkar melakukan penelitian kualitatif untuk memeriksa keadaan di daerah yang mengusung caleg muda, kemudian hal ini dikonsultasikan dengan koordinator pemenangan pemilu. Sehingga partai golkar bisa mempertimbangan kriteria calon legislatif yang bisa menambah suara untuk partai golkar (Agus, wawancara, 2020).

Mengenai kriteria, ketua Bidang Pendidikan dan Caleg 2019 DPP Partai Golkar menyampaikan bahwa:



"Kriteria untuk menjadi calon legislatif muda partai golkar adalah pemuda, berjanji mengabdikan kepada partai mengikuti ideologi partai, sanggup tidak melakukan hal-hal yang dapat menjelekkan nama partai, sanggup tidak money politik, tidak melanggar hukum, sanggup loyalitas dan sanggup tidak melakukan tindakan tercela. Selain itu, caleg DPR RI harus sudah aktif di partai golkar baik menjadi pengurus di DPP maupun simpatisan yang telah aktif di golkar. Karena partai kita adalah partai yang modern dan terbuka, bukan partai yang berdasarkan kepemilikan dari beberapa orang atau yang mendirikan karena kita partai sudah lama sekali dan kepengurusannya pun sudah berjenjang jadi mekanisme mekanisme itulah yang memungkinkan dalam proses seleksi itu tidak ada dinamika yang berat."

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kriteria untuk menjadi calon legislatif muda partai golkar adalah pemuda (berusia sampai dengan 30 tahun), berjanji mengabdikan kepada partai mengikuti ideologi partai, sanggup tidak melakukan hal-hal yang dapat menjelekkan nama partai, tidak money politik, tidak melanggar hukum, loyal, tidak melakukan tindakan tercela, dan aktif di partai golkar baik menjadi pengurus di DPP maupun simpatisan. Dasar pemikiran tentang persyaratan yang sangat sederhana tersebut adalah bahwa partai tidak ingin memberatkan bagi para peserta pencalegan pemilu tahun 2019. Partai golkar merupakan partai yang *modern* dan terbuka sehingga mekanisme mekanisme itulah yang memungkinkan dalam proses seleksi itu tidak memberatkan.

Kontrol

Dalam perekrukan politik ada beberapa tipe pengawasan yang juga penting dalam mempengaruhi sistem pengadaan dan permintaan. Adanya kualifikasi-kualifikasi formal yang dituntut dari calon-calon atau pemegang jabatan pada agensi. Beberapa diantaranya telah ditetapkan oleh agensi itu sendiri, ada pun yang ditetapkan oleh negara. Kualifikasi pendidikan juga diperlukan. Kontrol ini adalah sebagai proses untuk mengetahui sifat rekrutmen yang relatif terbuka atau tertutup.

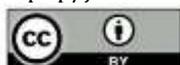
Dalam melaksanakan kontrol, ketua Bidang Pendidikan dan Caleg 2019 DPP Partai Golkar menyampaikan bahwa:

"Partai golkar memastikan konsolidasi partai seiring dengan kaderisasi yang berjenjang, jadi ada kata kunci konsolidasi dari pusat sampai daerah dan kaderisasi berjenjang. Dari kondisi itu di partai golkar ini selalu memperhatikan kriteria kriteria calon yang memiliki pengabdian yang baik, tergambar bagaimana di masyarakat dan ada waktu untuk kegiatan kepartaian dan yang terpenting adalah loyalitas terhadap partai, terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh partai. Seberapa besar loyalitas terhadap keputusan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh DPP. Yang terakhir rekrutmen berdasarkan anggota-anggota yang tidak tercela atau tidak memiliki riwayat kejahatan atau hal-hal yang memungkinkan nanti bisa diperkarakan, atau yang sudah memiliki track record yang sudah buruk sebelumnya. Dengan kriteria tersebut diajukan untuk menunjukkan minat dan baru nantinya akan diseleksi oleh DPP."

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk upaya yang dilakukan golkar dalam melaksanakan rekrutmen adalah dengan konsolidasi partai beriringan dengan kaderisasi. Konsolidasi internal partai Golkar sudah harus siap. Segala daya upaya mulai dari infrastruktur kemenangan dan strategi sudah harus matang. Untuk itu, partai golkar memperhatikan dengan baik kriteria calon legislatif muda serta bagaimana pandangan masyarakat terhadapnya. Tidak sampai disitu, loyalitas partai juga menjadi faktor yang penting. Proses rekrutmen mengharuskan untuk memeriksa riwayat kejahatan dari calon legislatif untuk meminimalisir kemungkinan bisa dipenjarakan. Semua ini yang menjadi kontrol partai golkar dalam menyelenggarakan rekrutmen.

Tuntutan

Rekrutmen Politik di Indonesia Di masa orde baru, rekrutmen politik di Indonesia pada dasarnya sangatlah tertutup. Hal ini terjadi karena dominannya lembaga kepresidenan. Siapa yang akan menjabat, apa, kapan, dan dimana, sama sekali tidak melibatkan anggota masyarakat. Proses rekrutmen sering kali didasarkan pada dasar patronage politik, dan bukan atas dasar kapasitas dan kepemimpinan. Akibatnya, tidak jarang kepemimpinan orang yang memegang jabatan



mendapat resistensi dari masyarakat. Hal tersebut, karena yang memegang jabatan bukanlah orang yang memiliki kecakapan atau kemampuan yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Kasus tersebut, misalnya dalam jabatan pimpinan partai politik, siapa yang menjadi ketua partai politik bukanlah seseorang yang memiliki basis dukungan massa yang kuat, tetapi yang mendapatkan dukungan dari kalangan pemerintah (Gaffar, 2006).

Namun hal ini tidak terjadi di partai golkar. Adanya tuntutan-tuntutan suatu partai politik untuk mencalonkan calon-calon legislatif yang sesuai dengan minat dan isu-isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat pada tiap pemilu (Rush, Michael & Althoff, 2002). Pertimbangan partai golkar untuk memilih calon legislatif muda adalah berdasarkan kemampuan prestasi setiap calon legislatif. Lebih lanjut ketua Bidang Pendidikan dan Caleg 2019 DPP Partai Golkar menyampaikan bahwa:

“Perekrutan golkar sangat terbuka karena berdasarkan kemampuan prestasi setiap caleg, jadi selalu banyak yang mendaftar karena kita memberi kesempatan yang sama untuk semua yang ingin mendaftarkan diri sebagai caleg. Masing – masing yang merasa dirinya mampu memimpin diberi kesempatan yang sama.”

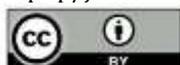
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perekrutan partai politik di golkar sangat terbuka. Adanya tuntutan-tuntutan suatu partai politik untuk mencalonkan calon-calon legislatif yang sesuai dengan minat dan isu-isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat pada tiap pemilu (Rush, Michael & Althoff, 2002). Namun hal ini tidak menjadi mutlak karena partai golkar akan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon legislatif yang penting berdasarkan kemampuan dan prestasi.

SIMPULAN

Perekrutan politik calon legislatif muda partai golkar untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 meliputi lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Penyediaan dalam hal ini merupakan suatu proses rekrutmen agar suatu partai dapat memenuhi kebutuhan partai dalam hal calon legislatif untuk pemilu. Pemuda lebih banyak memiliki suara menuntut permintaan terhadap calon legislatif muda partai golkar. Untuk partai golkar sendiri tidak ada jalur khusus dalam hal dalam hal pendaftaran calon legislatif, karena sistem terbuka.

Kriteria untuk menjadi calon legislatif muda partai golkar adalah, pemuda (berusia sampai dengan 30 tahun), berjanji mengabdikan kepada partai mengikuti ideologi partai, sanggup tidak melakukan hal-hal yang dapat menjelekkan nama partai, tidak money politik, tidak melanggar hukum, loyal, tidak melakukan tindakan tercela, dan aktif di partai golkar baik menjadi pengurus di DPP maupun simpatisan.

Upaya yang dilakukan golkar dalam melaksanakan rekrutmen adalah dengan konsolidasi partai beriringan dengan kaderisasi. Pertimbangan partai golkar untuk memilih calon legislatif muda adalah berdasarkan kemampuan prestasi setiap calon legislatif. Tuntutan pada partai politik tidak bersifat mutlak karena partai golkar akan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon legislatif yang penting berdasarkan kemampuan dan prestasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mukmin, U. (2015). *Kontribusi Organisasi Kepemudaan Ampi Dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang.
- Mukmin, U. (2015). *Kontribusi Organisasi Kepemudaan Ampi Dalam Penguatan Basis Massa Partai Golkar di Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang.
- Nurjaman, A. (2018). *Masa Depan Faksinonalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru*.
- Permatasari, P. I. (2017). Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Muda Studi Kasus: Penetapan Kuota 30% Caleg Muda Partai Golkar Di Kota Surabaya. *Jurnal Politik Muda Universitas Airlangga*, 6(1)
- Prayogo, F. (2015). Komunikasi Politik Adies Kadir Sebagai Calon Legislatif DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. *Repository UNAIR*.
- Prayogo, F. (2015). Komunikasi Politik Adies Kadir Sebagai Calon Legislatif DPR RI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. *Repository UNAIR*.
- Rahmadania, F. (2016). Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil I dan V di Kabupaten Sampang, Jawa Timur). *Repository UNAIR*.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salsabila, R. S. (2016). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru Tahun 2014. *JOM FISIP*, Vol. 3. No.2.
- Sugeng. (2015). Rekrutmen Politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI*, Vol. 2. No. 2.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

